

# Peran Stakeholder Ekowisata Berbasis Hutan Pinus, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung

Nathasya<sup>1\*</sup>, Yulia Rahma Fitriana<sup>1</sup>, Rommy Qurniati<sup>1</sup>, Gunardi D. Winarno<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Kehutanan, Universitas Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

\*E-mail: nathasyadrnsy2@gmail.com

**Intisari** — Hutan Lindung di Provinsi Lampung memerlukan pengelolaan secara bijaksana dan berkelanjutan agar tetap lestari, salah satunya dengan mengelola potensi ekowisata. Potensi ekowisata dapat bermanfaat bagi masyarakat apabila dapat menggabungkan antara potensi alam, aspek sosial, dan partisipasi masyarakat sebagai *stakeholders*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *stakeholders* di ekowisata hutan pinus, Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2021 di ekowisata hutan Pinus, Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Objek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam ekowisata hutan pinus Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Penentuan sampel diterapkan dengan menggunakan teknik *snow-ball sampling* dan metode wawancara mendalam (*indepth interview*), kuisioner, observasi di lapangan serta penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *stakeholders* terbagi menjadi *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator termasuk kedalam tiga jenis *stakeholders* yaitu *stakeholders* primer, sekunder, dan kunci. *Stakeholders* pada penelitian ini terdiri dari Gapoktan Srimulya II, Pekon Sukapura, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tangkit Tebak, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Kelompok Pecinta Alam GREEN, serta Himpunan Pemuda Peduli Hutan dan Lingkungan. Dengan adanya peran bagi seluruh *stakeholders* terkait, maka hak - hak dan kewajiban - kewajiban sesuai kedudukan dapat berjalan semestinya dan dapat memberikan kinerja optimal sehingga menunjang pengelolaan ekowisata. Diperlukan sinergitas dalam balutan kerjasama dan kolaborasi diberbagai peran *stakeholders* guna menciptakan ekowisata dengan nilai daya saing tinggi.

**Kata kunci** — Sinergitas Tinggi, Pihak Terkait, Hutan Lindung, Wisata Alam.

**Abstract** — Protected Forests in Lampung Province require wise and sustainable management to remain sustainable, one of which is by managing ecotourism potential. The potential of ecotourism can be beneficial for the community if it can combine natural potential, social aspects, and community participation as *stakeholders*. This study aims to determine the role of *stakeholders* in pine forest ecotourism, West Lampung Regency, Lampung Province. This research was conducted in October until November 2021 in the ecotourism of the Pinus forest, West Lampung Regency, Lampung Province. The object of this research is the parties involved in pine forest ecotourism in West Lampung Regency, Lampung Province. Sampling was applied using snowball sampling and *in-depth interview* methods, questionnaires, field observations, and document searches. The results showed that the roles of *stakeholders* were divided into *policy creators*, coordinators, facilitators, implementers, and accelerators including three types of stakeholders, namely primary, secondary, and key stakeholders. *Stakeholders* in this study consisted of Gapoktan Srimulya II, Sukapura Village, Tangkit Tebak Forest Management Unit, Youth and Sports Service Office, GREEN Nature Lovers Group, and Youth and Environmental Cares Association. With the role of all relevant stakeholders, the rights and obligations according to the position can run properly and can provide optimal performance to support ecotourism management. Synergy is needed in cooperation and collaboration in various *stakeholders* roles to create ecotourism with high competitive value.

**Keywords** — high synergy, related parties, protected forest, nature tourism.

## I. PENDAHULUAN

Hutan lindung di Indonesia memiliki fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati dunia [1]. Berdasarkan [2], hutan lindung merupakan

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tatanan air, mencegah banjir, mengendalikan menjaga kesuburan tanah. Namun permasalahan hutan lindung Indonesia sudah

memasuki kritis sehingga hutan lindung memerlukan pengelolaan secara bijaksana dan berkelanjutan agar tetap lestari, untuk mendukung tujuan dari peruntukkan pemanfaatan kawasan hutan lindung [3]. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut melalui pemanfaatan jasa lingkungan sebagai bentuk usaha memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata [4].

Ekowisata adalah gabungan antara konservasi dan pariwisata dengan pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan kepada kawasan yang perlu dilindungi untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati serta perbaikan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya [5]. Pengelolaan wilayah hutan, tak lepas dari masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya dari hasil hutan [6]. Ekowisata juga memiliki harmonisasi antara alam dengan masyarakat [7].

Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki hutan dengan berbagai potensi ekowisata, salah satunya adalah ekowisata hutan pinus dengan daya tarik berupa area dengan luas sebesar 1,7 ha yang ditumbuhi banyak pohon pinus [8]. Ekowisata dapat berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat lokal baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan apabila menggabungkan antara potensi alam dari suatu kawasan hutan yang dilindungi, aspek sosial masyarakat setempat, dan partisipasi masyarakat baik sebagai pelaku maupun penyelenggara dari kegiatan ekowisata, keterlibatan masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai *stakeholders* [9].

*Stakeholders* adalah pihak yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholders* jika memiliki karakteristik kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap suatu program [10]. Selain itu *stakeholders* juga dapat diartikan sebagai semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang sifatnya mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh, langsung maupun tidak langsung, aktifitas

serta kebijakan yang berlaku [11]. *Stakeholders* dapat berpotensi untuk mendukung keberhasilan pengembangan wisata alam baik perorangan, kelompok masyarakat maupun organisasi [12]. *stakeholders* dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu *stakeholders* kunci, primer, dan sekunder [13]. Selain itu *stakeholders* juga memiliki peran yang berbeda yang perlu dipahami sedemikian rupa agar pengembangan objek dan daya tarik wisata di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik [14].

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia telah menjalankan suatu peran (15). Peran *stakeholders* diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan dibidang pariwisata [16]. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui peran seluruh pihak terkait dalam pengelolaan ekowisata hutan pinus, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung guna menunjang pengelolaan ekowisata secara optimal dan berkelanjutan.

## II. BAHAN DAN METODE

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner atau daftar pertanyaan, kamera, alat tulis. Objek yang diteliti adalah seluruh *stakeholders* ekowisata hutan pinus Lampung Barat Provinsi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2021. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *snow-ball sampling* yaitu penentuan responden didasarkan atas pemangku kepentingan lainnya [17].

Penentuan responden dengan bantuan *stakeholders* kunci yang dipilih melalui pertimbangan yang bersangkutan memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian [18]. *Stakeholders* kunci merupakan lembaga atau individu yang berwenang secara legal dalam pengambilan keputusan [19]. *Stakeholders* kunci pada penelitian ini yaitu Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tangkit Tebak, Kelompok

Pecinta Alam (KPA) *Green*, Himpunan Pemuda Pecinta Hutan dan Lingkungan (HPPHL), Gapoktan Srimulya II, dan Pekon Sukapura. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), kuisioner, observasi di lapangan dan penelusuran dokumen berdasarkan tujuan penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Ekowisata Hutan Pinus

Ekowisata Hutan Pinus memiliki sejarah yang unik yaitu sekitar tahun 1970 sebelum dibuka menjadi lokasi ekowisata, lahan ini merupakan lahan bekas pembibitan pohon pinus sehingga pohon pinus tumbuh dengan sendirinya serta jarak antar tanam pohon pinus tidak beraturan seperti pada Gambar 1.



Gbr 1. Jarak tanam pohon pinus yang tidak beraturan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kawasan ini sudah puluhan tahun dibiarkan secara alami sehingga kawasan ini sempat menjadi tempat dari beberapa orang yang tidak bertanggungjawab dengan membuang sampah sembarangan dan menimbulkan tumpukan sampah plastik maupun lainnya sehingga mengganggu pemandangan. Ekowisata berbasis hutan pinus ini memiliki pohon pinus sejumlah 92 pohon dengan dua jenis yaitu pinus *perkusi* dan *blackpin*. Ekowisata ini juga dikenal dengan nama Pinus *Ecopark*. Pinus *Ecopark* terletak di Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak dan Register 24 Bukit Punggur, Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Lokasi ini dibuka sebagai ekowisata setelah adanya izin mengenai Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada tahun 2018 sebagai salah satu potensi

yang dikembangkan dalam program perhutanan sosial pada hutan lindung areal kerja KPH Tangkit Tebak.

HKm merupakan salah satu skema dari perhutanan sosial, dengan adanya HKm diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup [20]. Izin IUPHKm ekowisata hutan pinus ini resmi pada tahun 2018 dengan pembentukan Gapoktan Srimulya II sehingga terdapat bukti berupa plang izin pada lokasi ekowisata ini seperti pada Gambar 1.



Gbr 1. Plang izin HKm

Gapoktan Srimulya II terdiri dari 3 sub Kelompok Tani hutan (KTH) dengan izin pengelolaan perhutanan sosial meliputi pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan pengelolaan jasa lingkungan seperti wisata alam. Ekowisata ini masuk kedalam wilayah Pekon Sukapura, sehingga ekowisata ini sangat berdampak bagi masyarakat Pekon Sukapura antara lain yaitu sebagai pengatur tata air untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk irigasi sawah, penghasil kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga, dan sumber pencarian masyarakat untuk kebutuhan hidup, sehingga ekowisata ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat lokal.

#### B. Fasilitas Dan Daya Tarik Ekowisata

Setelah dikelola menjadi objek wisata, kawasan ini tertata indah bersih dan juga tersedia beberapa spot untuk foto serta dikenal sebagai sumber lokasi yang memiliki udara dingin, bahkan saat pagi hari kabut sering menyelimuti kawasan [21]. Hutan

Pinus Lampung Barat memiliki sapta pesona yaitu sebagai berikut : (1) tertib, ekowisata ini sudah cukup tertib dengan penataan yang cukup rapi, (2) aman, ekowisata ini terbilang cukup aman karena bebas dari gangguan tindak kejahatan, (3) bersih, pada lokasi memilih banyak fasilitas tempat sampah sehingga menunjang lokasi bersih, (4) indah, ekowisata ini memiliki keindahan dengan banyak pohon-pohon pinus, (5) sejuk, ekowisata ini sangat sejuk dan dingin karena lokasinya dan banyaknya pepohonan, (6) kenangan, ekowisata ini memiliki kesan sehingga membuat pengunjung memiliki keinginan untuk kembali ke lokasi ini, dan (7) ramah, lokasi ini memiliki masyarakat lokal yang ramah.

Sapta Pesona berasal dari dua kata yaitu sapta dan pesona yang dipahami sebagai 7 unsur yang terkandung dalam setiap produk pariwisata serta dipergunakan sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata. Sapta pesona merupakan jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata [22]. Selain sapta pesona guna menunjang daya tarik ekowisata hutan pinus Lampung Barat terdapat juga fasilitas yang cukup memadai.

Fasilitas yang ada di ekowisata ini selalu diperbarui guna menghindari kecelakaan yang terjadi pada pengunjung saat berada dan menggunakan fasilitas yang ada di lokasi. Beberapa fasilitas tersebut seperti mushola, kantin, gajebo, toilet, rumah pohon, jembatan, tempat cuci tangan (semasa pandemi), gubuk, payung warn-warni sebagai spot foto, wahana permainan anak-anak, *shelter* 1 dan 2, spot foto jarring-jarring, *flying fox*, dan bangku - bangku unik. Contoh fasilitas yang ada pada lokasi ekowisata ini yaitu gajebo disajikan pada Gambar 2.



Gbr 2. Fasilitas berupa gajebo

### C. Peran *Stakeholders*

*Stakeholders* ekowisata hutan pinus terdiri dari Gapoktan Srimulya II, Pekon Sukapura, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tangkit Tebak, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat, Kelompok Pecinta Alam *GREEN*, serta Himpunan Pemuda Peduli Hutan dan Lingkungan. *Stakeholders* tersebut terbagi menjadi *stakeholders* primer (utama), kunci, dan pendukung (sekunder) [16].

#### a. *Stakeholders* Primer (utama)

*Stakeholders* utama (primer) merupakan *stakeholders* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun negatif dari suatu rencana atau proyek serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut.

#### b. *Stakeholders* Kunci

*Stakeholders* kunci adalah pihak yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.

#### c. *Stakeholders* Pendukung

*Stakeholders* pendukung merupakan *stakeholders* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap proyek tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan.

Seluruh *stakeholders* tersebut memiliki peran sesuai kedudukannya sehingga terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan [23] sebagai berikut.

a. *Policy creator* yaitu berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan.

b. Koordinator yaitu berperan untuk mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat.

c. Fasilitator yaitu berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.

- d. Implementer yaitu sebagai pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator yaitu berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Pada penelitian ini hasil analisis peran sesuai dengan pembagian ketiga *stakeholders* pada ekowisata hutan pinus Lampung Barat disajikan pada Tabel 1, 2, dan 3.

Tabel 1. Peran *Stakeholders* Primer

| No | <i>Stakeholders</i> Primer |                        |
|----|----------------------------|------------------------|
|    | <i>Stakeholders</i> Peran  | Kegiatan Terkait Peran |

|   |                                                 |                       |                                                             |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Gapoktan Srimulya II                            | <i>Policy Creator</i> | Membuat kebijakan bersama                                   |
| 2 | Pekon Sukapura                                  |                       | Memiliki peran penentu keputusan dan saran terkait wisata   |
| 3 | Kelompok Pecinta Alam (KPA) GREEN               |                       |                                                             |
| 4 | Himpunan Pemuda Peduli Hutan Lingkungan (HPPHL) | Koordinator           | Saling koordinir dan koordinasi pada tiap agenda            |
|   |                                                 | Fasilitator           | Dirikan fasilitas bersama untuk tingkatkan objek daya tarik |
|   |                                                 |                       | Penyedia informasi terkait wisata                           |
|   |                                                 |                       | Menjalankan peraturan yang dibuat bersama                   |
|   |                                                 | Implementer           | Ikut serta langsung dilokasi wisata                         |
|   |                                                 |                       | Melaksanakan rapat rutin                                    |
|   |                                                 |                       | Mempromosikan wisata                                        |
|   |                                                 |                       | memberdayakan masyarakat lokal                              |
|   |                                                 | Akselerator           | Mensosialisasikan Pelestarian lingkungan                    |
|   |                                                 |                       | Amankan lokasi wisata                                       |
|   |                                                 |                       | Memberiusulkan kepada pemerintah                            |

*Stakeholder* Primer ekowisata terdiri dari empat organisasi yaitu Gapoktan Srimulya II, Pekon Sukapura, Himpunan Pemuda Peduli Lingkungan (HPPHL), dan Kelompok Pecinta Alam GREEN (Tabel 1). Keempat organisasi ini merupakan pendiri utama serta pihak yang secara langsung terkena dampak dengan adanya ekowisata ini sehingga termasuk kedalam *stakeholders* primer. *Stakeholder* primer ini membuat kesepakatan bersama dan membuat konsorsium sehingga terbentuk PPEPS yaitu pengelola Pinus Ecopark Sukapura dan menghasilkan statuta sebagai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh *stakeholders* primer. Landasan utama *stakeholder* primer dalam membuat statuta adalah tujuan utama yang sama yaitu memberdayakan masyarakat lokal guna mendapatkan dampak positif dalam segi peningkatan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan tanpa merusak hutan sehingga sesuai dengan konsep perhutanan sosial yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera.

Berdasarkan observasi, bahwa seluruh *stakeholders* primer ini memiliki azas kebersamaan sehingga harus mementingkan keputusan bersama dalam setiap pengambilan keputusan. Selain keputusan bersama, seluruh *stakeholders* primer tetap menerapkan adanya peran yang jelas dalam pengelolaan ekowisata ini. Pembangunan ekowisata ini tidak terlepas dari peran dan kerjasama seluruh *stakeholders*.

Peran *stakeholder* primer ekowisata ini telah memenuhi lima indikator yaitu sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. Semua indikator peran tersebut disertai dengan adanya kegiatan untuk menunjang pengelolaan ekowisata hutan pinus. Dalam hal ini, kegiatan *stakeholders* yang diterapkan tetap memperhatikan dan mengutamakan kebersamaan sesuai aturan yang telah disepakati sehingga seluruh kegiatan dalam pengelolaan ekowisata ini saling berkaitan dan dilakukan secara

bersama-sama oleh keempat organisasi selaku *stakeholders* primer. Banyak contoh kegiatan yang dilakukan bersama terutama dalam penambahan fasilitas dilokasi ini seperti membangun kantin dilakukan secara bergotong-royong. Menurut para *stakeholders* primer ekowisata ini, bahwa dengan adanya sinergitas yang seimbang dalam pembagian peran dapat meminimalisir adanya konflik yang terjadi antar *stakeholders* primer.

*Stakeholders* primer harus dapat meningkatkan kerjasama secara optimal karena dalam hal pengelolaan dan pengembangan suatu destinasi wisata tidak mungkin dapat berjalan maksimal jika tidak melibatkan peran dan partisipasi aktif *stakeholders* lainnya [24]. Selain itu dalam penelitian [25] dikemukakan bahwa kontribusi *stakeholders* utama atau primer sangat berkaitan dengan pengelolaan secara teknis terkait penetapan aturan atau kebijakan dalam pengelolaan, pengembangan objek daya tarik wisata dan pengembangan yang berbasis pada masyarakat.

Tabel 2. Peran *Stakeholders* Kunci

| NO | <i>Stakeholders</i> Kunci |             |                                                                                                                   |
|----|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Stakeholders</i>       | Peran       | Kegiatan<br>Terkait Peran                                                                                         |
| 1  | KPH<br>Tangkit<br>Tebak   | Fasilitator | Mengadakan<br>penyuluhan<br>mengenai<br>perhutanan<br>sosial serta<br>pengelolaan<br>ekowisata<br>dihutan lindung |

KPH Tangkit Tebak termasuk kedalam *stakeholders* kunci, karena memiliki kewenangan legal dalam izin HKm tersebut, salah pengelolaan jasa lingkungan seperti ekowisata untuk mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari. Peran KPH Tangkit Tebak diterapkan secara optimal melalui penyuluhan sehingga dapat meninjau langsung perkembangan lokasi ekowisata ini. wawancara dan observasi dari seluruh *stakeholders* memberikan informasi bahwa lokasi wisata ini merupakan wisata legal pada wilayah kerja KPH Tangkit Tebak sehingga pengembangan ekowisata harus sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan



KPH Tangkit Tebak selaku pembina pengembangan potensi hutan dalam skema perhutanan sosial termasuk potensi ekowisata.

Tabel 3. Peran *Stakeholders* Sekunder

| No | <i>Stakeholders</i> Sekunder                           |                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Stakeholders</i>                                    | Peran                                                                                       |
|    |                                                        | Kegiatan Terkait Peran                                                                      |
| 1. | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat | Fasilitator<br>Menambahkan fasilitas berupa shelter<br><br>Ada Pelatihan mengenai ekowisata |
|    | Implementer                                            | Berpartisipasi langsung Melalui pokdarwis                                                   |

*Stakeholders* sekunder pada ekowisata ini terdiri dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat yang berperan sebagai fasilitator baik berupa pelatihan langsung mengenai ekowisata seperti bagaimana caranya agar pengunjung dapat terlayani dari 3 sisi yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, sehingga menjadi tanggungjawab bersama terutama seluruh *stakeholders* ekowisata hutan pinus ini. Selain itu dalam pelatihan juga diberikan bagaimana cara membina karakteristik, tata kelola, dan manajemen kelembagaan sehingga menjadi satu lingkup hingga promosi wisata. Terdapat juga pembinaan mengenai masyarakat lokal, salah satunya dengan membangun kearifan lokal sebagai cirikhas daerah tersebut. Kearifan lokal dapat dikatakan sebagai atraksi yang menarik bagi wisatawan guna langkah kedepan untuk menjadi wisata yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Selain itu daya tarik lokalitas memberikan pemahaman positif bagi tumbuhnya nilai kearifan lokal dan nilai-nilai kehidupan yang memberi makna pada pola kehidupan dan interaksi sesama masyarakat dengan nilai strategis budaya lokal menjadi sumber inspirasi daerah untuk mengembangkan potensi lokalitas terutama dalam pengembangan kegiatan wisata [26]. Dinas Pariwisata juga memberikan penambahan fasilitas pada

ekowisata hutan pinus sebanyak dua shelter seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Shelter

Dinas pariwisata berperan sebagai implementer melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang terlibat secara langsung pada ekowisata tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

*Stakeholders* ekowisata terdiri dari empat *stakeholders* primer yaitu Gapoktan Srimulya II, Pekon Sukapura, KPA GREEN, dan HPPHL dengan lima peran yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer, serta akselerator, sedangkan untuk *stakeholders* kunci terdiri dari KPH Tangkit Tebak sebagai fasilitator, dan untuk satu *stakeholders* sekunder terdiri dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat sebagai fasilitator dan implementer. Pembagian peran *stakeholders* sudah cukup optimal dengan adanya ketiga kategori *stakeholders* serta lengkapnya lima indikator peran *stakeholders* pada ekowisata hutan pinus lampung Barat, sehingga melalui kolaborasi peran *stakeholders* dapat dikatakan mampu menunjang ekowisata untuk memiliki daya saing tinggi guna menuju ekowisata berkelanjutan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada seluruh *stakeholders* ekowisata hutan pinus Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung yang telah membantu dalam penelitian ini.

#### REFERENSI

- [1] Surya, M. I., & Astuti, I. P. "Keanekaragaman dan potensi tumbuhan di kawasan Hutan Lindung Gunung Pesagi, Lampung Barat". In *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*. 2017, prosiding 3.2, p. 215.
- [2] Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Lembaran RI Tahun 1999 No 41. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [3] Ginoga, K., Lugina, M. dan Djaenudin, D, "Kajian kebijakan pengelolaan Hutan Lindung," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*, vol. 2, pp. 203-232, Juli. 2005.
- [4] Sundari F, "Strategi Promosi Pengembangan Wisata Pinus Ecopark Melalui Media Sosial Dalam Persepektif Etika Bisnis Islam (Study Pada Wisata Pinus Ecopark di Lampung Barat)," Skripsi. Indonesia. Juni. 2020.
- [5] Priono Y, "Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkiling Berbasis Masyarakat." *Jurnal Perspektif Arsitektur*, vol. 7, pp. 51-67, Juli. 2012.
- [6] Qurniati, R., Duryat, D., & Kaskoyo, H, "Penguatan kelembagaan pengelola hutan desa di sekitar Gunung Rajabasa Lampung." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, vol. 1, pp. 80-86, Janu. 2018.
- [7] Alfatianda, C. dan Djuwendah, E, "Dampak ekowisata dan agrowisata (eko-agrowisata) terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Cibuntu." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, vol. 4, pp. 434-443, Sept. 2017
- [8] KPH Tangkit Tebak., *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Tangkit Tebak*, Buku. Lampung: KPH Tangkit Tebak. 2018, vol. 61.
- [9] Nurkhalis, A. H. dan Sunarminto, T., "Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Hutan Adat Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan." *Jurnal Pariwisata*, vol. 5, pp. 107-119, Sept. 2018.
- [10] Budiningsih K., Ekawati S., Gamin., Sylviani, Suryandari., E Y. dan Salaka F, "Tipologi dan strategi pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 12. pp. 283-297, Okto. 2015.
- [11] Reed, M., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, CH. and Stringer, L. C, "Who's and Why? A Typology of stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management." *Journal of Environmental Management*, vol. 90pp. 1933-1949, April. 2009.
- [12] Widodo, M. L., Soekmadi, R. dan Arifin, H. S, "Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di taman nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu." *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, vol. 8., pp. 55-61, April. 2018.
- [13] Maryono, E., Kuswanto, S., Getteng, M., Ahmad, T., & Mulyasari, S, "Pelibatan Publik dalam Pengambilan Keputusan (Public Involvement in Decision Making)." *Jakarta*, 2005. *LP3ES*.
- [14] Amalyah R, Hamid D., dan Hakim L, "Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, vol. 37., pp. 158-163. Agus. 2016..
- [15] Talakua, Y, "Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon. *Spirit Publik*." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 13., pp. 1-16. April. 2018
- [16] Hidayah N.A., Hutagalung S.S., dan Hermawan D, "Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 55. pp. 55-71. April. 2019.
- [17] Roslinda, E., Darusman, D., Suharjito, D., Nurrochmat, D. R, "Analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat." *JMHT*, vol. 53. pp. 78-85. Agus. 2012.
- [18] Alviya, I., Suryandari, E. Y., Maryani, R., & Muttaqin, Z, "Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah hulu daerah aliran sungai Ciliwung." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, vol. 3. pp. 121-134, Agus. 2016.
- [19] Yeny, I, "Para pihak dan perannya dalam pembangunan KPH model di Tanah Papua." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, vol. 11. pp. 193-206. Agus. 2014.
- [20] Nandini, R, "Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada hutan produksi dan hutan Lindung di Pulau Lombok." *Jurnal penelitian hutan tanaman*, vol. 10. pp. 43-55. Janu. 2013.
- [21] Setyawan, D., dan Sundari, F, "Marketing digital wisata pinus ecopark dalam etika bisnis islam di Lampung Barat." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*. vol. 5. pp. 21-51. Juni. 2020.
- [22] Hadi W dan Widyaningsih H, "Implementasi Penerapan Sapta Pesona Wisata Terhadap Kunjungan Wisatawan Di Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal*



*Pariwisata Dan Budaya*. vol. 11. pp. 127-136. Sept. 2020

[23] Nugroho, H. C., Zauhar, S. dan Suryadi. Koordinasi pelaksana program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal PAL*. vol. 5. Pp. 12-22.. 2014.

[24] Berliandaldo M, Chodiq, a., Fryantoni d, “Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong.” *INOBIJurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*. vol. 4 .pp.221-234. Maret. 2021.

[25] Mahfud, M, “Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, vol. 3. pp. 2070 - 2076. 2015

[26] Wakka, Kadir, “Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana

Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan., *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, vol. 3. Pp. 47-55. April. 2014.

[27] Nawangsih. 2017, Nilai Kearifan Lokal Kawasan Wisata Menggunakan Pendekatan Marketing Berbasis Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*. vol, 7. pp. 57 – 65. Maret. 2017.